

## **BUDAYA POLITIK PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Masagus A.Rahman Wempie,<sup>1</sup> \* Achmad Akmaluddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

e-mail: [arwtinggi@gmail.com](mailto:arwtinggi@gmail.com)<sup>1</sup> [\\*achmad28akmaluddin0470@gmail.com](mailto:*achmad28akmaluddin0470@gmail.com)<sup>2</sup>

[\\*Corresponding Author](#)

### **Abstrak**

Budaya politik adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, pelaksanaan penyelenggaraan negara, kebijakan negara, undang-undang, adat istiadat dan standar adat yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat yang dialami setiap hari. Sedangkan Pemilihan umum merupakan implementasi dari Demokrasi. Dan sebuah negara juga tidak terlepas dari generasi milenial dan generasi z sebagai penerus pembangunan masa depan suatu negara. Tingginya otoritas generasi milenial dan z atas hak suara menjadi salah satu kepentingan utama setiap tim sukses, hanya saja pemilih generasi milenial dan gen z sangat akrab dengan kemajuan teknologi sehingga membuat beberapa miss informasi yang tentunya mempengaruhi calon yang mereka pilih. Selain itu tim sukses memiliki tantangan tersendiri dalam mengajak mereka untuk memilih calon yang masing-masing tim sukses siapkan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana kaum milenial dan gen z terlibat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan, yaitu mencari berbagai referensi tentang keterlibatan pemilih milenial dan gen z Indonesia dari buku dan artikel ilmiah. Kajian ini menyimpulkan bahwa partisipasi milenial dan gen z sangat berpengaruh terhadap tingkat elektoral calon yang diusung dan menjaga semangat demokrasi, dan diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan pemilih di sektor milenial dan gen z.

**Kata kunci**— Demokrasi, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Pemilu.

### **Abstract**

*Political culture is a pattern of people's behavior in state life, implementation of state administration, state policies, laws, customs and customary standards adopted by all members of society that are experienced every day. While the general election is an implementation of democracy. And a country is also inseparable from the millennial generation and generation z as the successor to the future development of a country. The high authority of millennials and z generations over voting rights is one of the main interests of every successful team, it's just that millennial and gen z voters are very familiar with technological advances so that they make some miss information which of course affects the candidates they choose. In addition, the successful team has its own challenges in inviting them to choose candidates that each successful team prepares. This article aims to provide knowledge about how millennials and gen z are involved in exercising their voting rights in the implementation of elections. Using qualitative research methods and literature, which is*

*looking for various references about the involvement of Indonesian millennial and gen z voters from books and scientific articles. This study concludes that the participation of millennials and gen z greatly influences the electoral level of candidates who are promoted and maintains the spirit of democracy, and several strategies are needed to increase voters in the millennial and gen z sectors.*

**Keywords:** *Democracy, Millennial Generation, Generation Z, and Elections.*

## **I. PENDAHULUAN**

Budaya politik milenial saat ini tidak terlepas dari internet dan media sosial, yang tidak terpisahkan dari besar kehidupan masyarakat Indonesia baik warga kelas ekonomi menengah ke atas dan generasi muda. Massifnya pengguna internet dan media sosial mampu menggeser media konvensional maupun wadah sosial yang selama ini memiliki peran pokok dalam menyebarkan pengetahuan warga.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sangat menarik untuk diteliti bahwa sekitar 70 juta anak milenial memiliki hak suara dalam politik. Jumlah pemilih yang sangat fantastis dalam moment pesta demokrasi, ternyata kamu muda mengambil porsi yang cukup besar.

Generasi milenial merupakan topik yang unik untuk dibahas dalam pemilihan umum Tahun 2024. Nasir (2020) setiap warga negara mendapatkan kebebasan, keadilan dan kesetaraan dalam implementasi konsepsi dan gagasan pada pemilu untuk menentukan siapa calon pemimpin mereka.

Partisipasi pemilih milenial dan gen z maupun warga negara yang memasuki usia pemilih menjadi indikator yang penting untuk mengetahui sistem demokrasi sebuah negara. (Sule&Sambo(2020)) rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum suatu negara, menandakan adanya permasalahan dan memerlukan solusi untuk penyelesaian.

Gatara&Said (2007) saat ini budaya politik di Indonesia merupakan realitas yang fundamental dan paling kuat dalam sistem politik. Budaya politik itu sendiri adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, pelaksanaan penyelenggaraan negara, kebijakan negara, undang-undang, adat istiadat, dan standar adat yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat yang dialami setiap hari.

Perbedaan karakter politik budaya pemilih terpolo dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan milenial. Pemilih milenial dan kebangkitan budaya dan gaya hidup global di masyarakat saat ini seperti dunia tanpa batas. Dominasi bentuk homogen dan hegemoni oleh negara-negara maju, telah menciptakan tipikal generasi milenial dengan gadget.

Bagi peserta pemilihan umum 2024 pemilih milenial menjadi basis pemilihan di Kota Baturaja, pemahaman tentang budaya masyarakat penting untuk dapat melanjutkan proses sosialisasi pencalonan. Pengenalan yang baik terhadap budaya pemilih milenial mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap seorang calon.

Pemilih Pemula (milenial dan gen z) merupakan individu-individu yang baru pertama kali memberikan hak suaranya dalam Pemilihan umum. Sesuai aturan yang berlaku bahwa pemilih yang mendapatkan hak pertama kali dalam mengikuti pesta demokrasi yaitu sudah

berumur 17 tahun dan apabila sudah menikah (Undang-Undang, 2003). Mereka yang merupakan Warga Negara Indonesia, sudah berusia 17, atau sudah/pernah menikah memiliki hak untuk menyuarakan suaranya dalam Pemilihan Umum, aturan ini juga umumnya berlaku pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilu pada Tahun 2024 yang akan datang merupakan kali kedua Indonesia menyelenggarakan Pemilihan umum yang diadakan serentak dengan menggabungkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden sebagai badan Eksekutif, serta memilih anggota Legislatif. Bila kita hitung, yang menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah generasi yang lahir sekitar tahun 2003 sampai dengan 2007.

Kajian terdahulu tentang generasi milenial ini pernah di teliti oleh (Komariah and Kartini, 2019) meneliti tentang media dan budaya generasi milenial dalam politik, Sapiro and Rufaida (Sapiro and Rufaida, 2020) meneliti tentang pengetahuan generasi milenial tentang surat suara dan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi, 2020) pengaruh media sosial youtube terhadap faktor keputusan pemilihan pemimpin generasi milenial, dari beberapa penelitian tentang generasi milenial belum ada yang melakukan penelitian tentang partisipasi milenial dan gen Z pada pesta demokrasi seperti pada pemilihan umum, untuk itu fokus penelitian ini untuk diri melihat partisipasi dan budaya politik milineal di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemilihan umum serentak menjadi momen yang akan menjadi bahan penelitian ini untuk mengukur, seberapa besar partisipasi para pemilih yang kami fokuskan pada pemilih milenial dan gen z untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan tujuan melihat dampak dari partisipasi pemilih milenial dan gen z bagi pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh

Indonesia, terutama pada pemilihan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, dengan studi kasus budaya politik milineal pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Informan dalam penelitian ini adalah Informan 1 Ketua HMI dan Informan 2 Ketua BEM di Universitas Baturaja. Dan Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah depth interview dan in depth interview. Selain penulis menggunakan studi pustaka dan dokumentasi untuk memberikan informasi terkini yang dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah. .

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Karakteristik generasi milineal, berbeda dengan generasi sebelumnya, khususnya pada penggunaan teknologi dan digital seperti penggunaan gadget atau android, dan pemanfaatan penggunaan media dalam berbagai konteks dan pekerjaan (Naldo & Satria, 2018; Betz, 2019; dan Komariah & Kartini, 2019).

Generasi ini berkembang dengan cepat, banyak hal high-quality dan bad pada proses perkembangan generasi ini, dimana kemajuan teknologi membuat generasi milineal cepat menyerap informasi yang ada pada setiap lini masa, penggunaan komunikasi on line seperti whatsapp, line dan Instagram merupakan salah satu sumber informasi yang mereka gunakan dalam menentukan calon pemimpin nantinya. Berbicara tentang politik tidak akan terlepas dari ke generasi millennial (Tarsidi et al., 2019).

Menurut Potehadi (2019) dalam tulisannya di Kompasiana.com, Pada tahun 2019 menjadi sebuah momentum politik

yang sangat membutuhkan peran dari generasi milenial yang cakap dalam media, tanggap, kreatif, dan advokatif

Generasi Milenial sebagai generasi penerus bangsa, sangat amat diperlukan di bidang politik, apabila partisipasi mereka sangat rendah, siapa yang akan meneruskan perpolitikan dalam suatu Negara?. Penelitian yang dilakukan oleh Christiany Juditha dan Josep Darmawan yang berjudul “Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial” menunjukkan penggunaan media yang sering kali digunakan untuk mengakses informasi umum ataupun berita politik oleh generasi milenial yaitu media online dengan 80,5% 100% responden.

Untuk itu, agar meraih pasrtisipasi generasi milenial pada bidang politik perlu mengikuti teknologi yang instant dan maju. Dalam penelitian selanjutnya, Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2019 mendatang menunjukkan Mayoritas responden milenial (91,1%) mengaku akan memberikan suara mereka (Juditha & Darmawan, 2018).

### **Peran Serta Politik Pemilih Milineal Pada pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Sejumlah survei menunjukkan, pemilih gen z dan generasi milenial diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Hal itu ditunjukkan oleh hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Januari 2021, dan diperkuat oleh hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Oktober 2021. Survei BPS mencatat jumlah usia muda produktif (15-64 tahun) pada 2020 mencapai 191,08 juta jiwa atau sekitar 70,72% dari jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Ini lebih tinggi dari angka pemilu 2019, di mana setengah dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari pemilih muda (usia 17-40 tahun).

KPU mencatat, pada pemilu 2019, usia pemilih 21-30 sebanyak 42.843.792 orang, dan usia 31- 40 tahun 43.407.156 orang. Jika jumlah ini ditambah pemilih usia 17-20 tahun, maka persentase pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial (lahir tahun 1981-1999) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) mencapai 50%.

BPS menyebut, jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) 16,07 juta jiwa (9,78%). Buku terbitan BPS "Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035" menyimpulkan, pada tahun 2024 jumlah penduduk usia produktif angkanya masih mendekati tahun 2020. Survei Litbang Kompas yang dirilis Oktober 2021 mengungkapkan, generasi milenial dan generasi Z lebih mendominasi ketimbang generasi lainnya, dan berhak mengikuti pemilu pada 2024. Mengutip hasil sensus penduduk 2020 yang diolah Litbang Kompas/DDY, proporsi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan generasinya yang dijelaskan dengan tabel berikut

**Tabel 1.** Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Generasi

N	Generasi	Umur	Persenta se
1	Post Gen Z	< 8 Tahun	10,88%
2	Gen Z	8 – 23 Tahun	27,94%
3	Millenial	24 - 39 Tahun	25,87%
4	Gen X	40 – 55 Tahun	21,88%
5	Baby Boomer	56 – 74 Tahun	11,56%
6	Pre-boomer	>74 Tahun	1,87%

Dan menurut data BPS Kab. OKU pun, jumlah generasi milenial dan generasi Z sangat mendominasi dibandingkan dengan generasi lain, hal ini dapat kita lihat dari tabel berikut:

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	17715	17056	34771
5-9	18294	17487	35781
10-14	16767	15661	32428
15-19	15099	14198	29297
20-24	15404	14574	29978
25-29	15352	14492	29844
30-34	15528	14787	30315
35-39	14866	13745	28611
40-44	13887	12892	26779
45-49	12063	11256	23319
50-54	10261	10068	20329
55-59	8468	8233	16701
60-64	6575	6300	12875
65-69	4700	4514	9214
70-74	2671	2851	5522
75+	2528	2814	5342
<b>Ogan Komering Ulu</b>	<b>190178</b>	<b>180928</b>	<b>371106</b>

Dari data BPS Kab OKU dapat terlihat total kelompok Gen Z dan Millennial 148.045 orang terdapat 61% dari jumlah mat Sedangkan dari data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU, mereka menetapkan daftar pemilih sementara di 13 Kecamatan di Kabupaten OKU Sebanyak 258.543 Pemilih yang terdiri dari 77.685 pemilih milenial dan gen z (pemilih pemula).

Dewasa ini, banyak terdapat sejumlah kendala yang terkait dengan pemilih pemula yang di antaranya pertama, pemilih pemula yang pada hari pencoblosan berumur 17 tahun dan ingin mengikuti Pemilu masih banyak yang belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP, alias belum memiliki e-KTP. Kedua, syarat perekaman, penerbitan, dan pemberian e-KTP baru bisa dilakukan pas di hari ketika penduduk berusia 17 tahun. Sementara bila dilakukan perekaman dan penerbitan e-KTP tepat di hari pemungutan suara, meskipun waktu itu sempat dijanjikan Mendagri Tjahjo Kumolo bisa dilakukan hanya dalam waktu satu jam jika seluruh persyaratan terpenuhi

bisa dianggap melanggar aturan dan sangat riskan dilakukan. Apalagi di hari libur karena dipastikan seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat pemilih tengah berkonsentrasi untuk mengikuti Pemilu 2024.

Ketiga, dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu diatur mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Syaratnya, harus menunjukkan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1KPU (PKPU No. 11 tahun 2018, Pasal 37 ayat 1). Selain itu, pada Pasal 348 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya, kepemilikan KTP elektronik (KTP-E) menjadi syarat sah bagi warga negara untuk dapat menggunakan hak pilih. Tanpa KTP-E, mereka tak bisa memilih. Jadi, meskipun pemilih pemula sudah masuk dalam DPT, jika tidak mempunyai e-KTP atau Suket, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Masalah lainnya di antaranya pertama, pemilih gen z rawan dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas kontestan Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Kedua, pemilih gen z rawan didekati, dipersuasi, dipengaruhi, dimobilisasi, dan sebagainya untuk bersedia mengikuti kampanye yang dilaksanakan. Padahal sebelum ini, para kontestan Pemilu tersebut tidak jelas kepeduliannya terhadap pemilih pemula. Ketiga, pemilih gen z masih banyak mengidap penyakit labilitas dan emosionalitas. Dalam konteks Pemilu, mereka berada dalam pusaran antara antusiasme politik dengan apatisme

politik. Pada satu sisi sangat bersemangat dan ingin mengetahui seputar Pemilu, khususnya melalui media sosial. Namun, belum tentu antusiasisme tersebut simetris dengan realitas perilaku politiknya. Bahkan tidak sedikit kalangan pemilih gen z, termasuk mahasiswa, lebih memilih tidak menyalurkan hak pilihnya alias Golput.

Dengan kata lain antusiasisme politik kalangan muda, khususnya pemilih gen z di politik lebih merefleksikan suatu fenomena romantisme politik atau *sensate democracy*. Keempat, pemilih gen z sering menjadi sasaran empuk politik transaksional, atau politik uang. Politik uang dalam konteks pemilih gen z bisa berangkat atas inisiatif dari partai politik, tim kampanye, dan para calo politik (*political broker*). Tetapi, bisa juga berasal dari inisiatif pemilih gen z itu sendiri. Jangan lupa, di antara pemilih gen z juga sudah mengenal politik uang serta sumber-sumber dari politik uang tersebut. Hanya saja politik uang di kalangan pemilih gen z cenderung hanya dalam jumlah terbatas, recehan atau eceran. Bukan dalam jumlah besar, glosiran, partaian, atau kardusan. Kelima, pemilih gen z belum berpengalaman dalam mengikuti kegiatan Pemilu, khususnya pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kegiatan ini gampang-gampang susah. Terlebih pada Pemilu Serentak 2024 nanti di mana surat suara (*ballot paper*) yang harus 'dicoblos' oleh pemilih cukup banyak, yakni: (1) untuk Capres dan Cawapres, (2) anggota DPR, (3) anggota DPD, (4) anggota DPRD Provinsi dan (5) untuk anggota DPRD di tambah lagi pada tahun 2024 nanti pemilukada akan dilakukan secara serentak. Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa, contohnya saja peningkatan angka golput pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengansikap responsif.

Tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanyamementingkan kepentingan sesaat. Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan. Memilih untuk golput sama saja dengan mengabaikan nilai-nilai etika dalam bernegara. Oleh karena itu diharapkan kepada generasi milenial dan pemilih pemula untuk menerapkan nilai-nilai etika dengan ikut berperan aktif dan tidak golput dalam pesta demokrasi. Mereka jadi segmen yang sangat strategis untuk dilibatkan partisipasinya dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia. Membangun persepsi bahwa politik yang baik dan sehat itu adalah hal penting menjadi mendesak dilakukan. Jangan sampai para pemilih pemula ini terus terjebak pada apatisisme politik yang membuat mereka memilih untuk golput dan kehilangan selera untuk berpartisipasi dalam politik pada umumnya dan pemilu pada khususnya.

Milenial dan gen z sangat diperhitungkan tentang partisipasinya di pemilu 2024 yang akan datang, karena mereka menjadi salah satu penentu sukses tidaknya pemilu 2024. Milenial dan gen z menguasai 40-50% pemilih, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan pemimpin masa depan. Dalam konteks ini, partisipasi politik kaum milenial sangat tinggi, karena kaum

milenial menyumbangkan banyak suara di kalangan pemilih pada pemilu 2019 (Juditha & Darmawan, 2018). Milenial dan gen z memiliki pengaruhnya sendiri terhadap pemilu, selain dari jumlah mereka yang banyak, generasi mereka hidup di era informasi dimana segala sesuatunya menggunakan internet atau media online. Selain itu, seiring dengan perubahan dunia politik yang menuntut lebih banyak kaum milenial untuk memahami ranah-ranah tersebut agar dapat menembus tirani yang dibangun oleh kepentingan elemen-elemen politik yang mendominasi aktivitas politik terlebih dahulu. Merekalah yang bisa membangun dan mengubahnya.

Dengan kekuatan yang cukup tinggi, bukan tidak mungkin kaum milenial dan gen z akan menjadi target pemasaran utama setiap tim kandidat yang berhasil. Minimnya informasi yang benar dan maraknya berita hoax di setiap media massa membuat kebingungan bagi setiap pemilih milenial (Septiadi et al., 2020), yang menimbulkan banyak spekulasi—dan spekulasi itu sendiri membuat kaum milenial dan gen z yang memilih kurang termotivasi, karena mereka tetap skeptis terhadap setiap kandidat yang diajukan. Selain itu, pola komunikasi yang berbeda di setiap daerah menjadi masalah tim sukses meneliti pola komunikasi tradisional di masing-masing daerah, dan masyarakat biasanya lebih diterima jika masyarakat yang datang sudah memahami adat dan budaya daerah sasaran acara. (Wibowo, 2019).

Indonesia akan menerima bonus demografi pada tahun 2030, ketika kaum milenial dan gen z berperan besar dalam pengambilan keputusan hak suara, yang kini telah dijelaskan secara gamblang oleh sumber-sumber dari lembaga investigasi pada pemilihan umum yang lalu, diperkuat oleh Lipi, mereka mengatakan: 40% adalah pemilih milenial (Abdi, 2018). Partisipasi milenium dan gen z akan

memanaskan pestai demokrasi berikutnya, dan tim sukses yang menarik perhatian kaum milenium dan gen z akan memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan proses demokrasi

#### **IV. KESIMPULAN**

Partisipasi pemilih pemula (gen z dan milenial) adalah warga negara dalam usia pemilih. Milenial didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara tahun 1980-an dan akhir 1990-an. Partisipasi pemilih milenial dan gen z dalam pemilu merupakan indikator penting tentang seberapa baik kinerja suatu negara. Partisipasi pemilih milenial dan gen z yang rendah dalam pemilihan umum suatu negara menunjukkan masalah yang perlu ditangani. Milenial dan gen z merupakan generasi yang akrab dengan kemajuan teknologi. Milenial dan gen z sebagai generasi penerus suatu negara sangat dibutuhkan di bidang politik. Jika partisipasi mereka rendah, maka suatu negara tidak memiliki penerus politik. Oleh karena itu, temuan menunjukkan bahwa peran dan partisipasi politik kaum milenial dan gen z akan tetap sangat penting bagi beberapa demokrasi di masa depan, dan masing-masing tim yang sukses harus dapat mengembangkan strateginya sendiri untuk menarik perhatian pemilih milenial dan gen z karena jumlahnya hingga 40-50% dari pemilihan umum. Hal ini membuat partisipasi pemilih milenial dan gen z sangat dibutuhkan.

#### **V. SARAN**

Dalam penelitian peneliti menemukan budaya politik milineal sangat memberikan pengaruh untuk pemilihan serentak di Tahun 2024. Karena itu sangat diperlukan strategi-strategi peningkatan jumlah hal pilih bagi generasi milenial, selain itu untuk meningkatkan jumlah tingkat partisipasi pemilih milenial dapat

dilakukan dengan beberapa cara seperti promosi calon – calon pimpinan dari setiap partai atau pun materi dengan menggunakan media elektronik seperti youtube, istagram, facebook, dan media komunikasi seperti whatsapp dan line. Dikarenakan karakteristik pemilih milenial lebih menonjol dengan melihat track record calon yang disusung melalui media teknolog

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. (2018). *Hasil Survei LIPI: 40 Persen Suara di Pemilu Didominasi Milenial Ilustrasi Kotak suara KPU*. Tirto.Id. <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5, 1–20.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* cetakan 5. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fauzi, A. (2020). *Pengaruh media sosial Youtube terhadap generasi milenial dalam menentukan pilihan presiden pada pemilu 2019*. Universitas Pelita Harapan
- Jaelani, L. (2019). Implementation Of Aqidah Akhlak Learning Using The Contextual Learning Model In Ma An-Nur Malangbong Garut District. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(2), 48–60.
- Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial Use Of Digital Media And Political Participation Milenial generation. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol*, 22(2), 94–109
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu. *ARISTO*, 7(2), 228–248.
- Laksmitha, N., & Susanto, E. H. (2019). Partisipasi Politik Generasi Milenial di Instagram dalam Pemilu 2019. *Koneksi*, 3(1), 250–254
- Lalo, K. (2018). Menciptakan generasi milenial berkarakter dengan Pendidikan karakter guna menyongsong era globalisasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 8.
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50.
- Nindyati, A. D. (2017). Pemaknaan Loyalitas Karyawan Pada Generasi X Dan Generasi Y (Studi Pada Karyawan Di Indonesia). *Journal of Psychological Science and Profession*, 1(3), 59–66.
- Potehadi, M. (2019). *Peran Generasi Milenial dalam Ruang Politik*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/melkianuspotehadi/5d85c264097f367be43d5572/peran-generasi-mileneal-dalam-ruang-politik>
- Sacipto, R., & Rufaida, K. K. (2020). Analisa Pengetahuan Generasi Milenial Terhadap Warna Surat Suara Pemilu 2019 Kabupaten Semarang. *ADIL Indonesia Journal*, 2(1)
- Septiadi, M. A., Joharudin, A., Lestari, N. G., Fajri, R. R., & Khendra, M. (2020). Halal Politics Role in the Fight against Vote-Buying and Hoaxes. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(2), 33–39.
- Sule, B., & Sambo, U. (2020). THE 2019 general election and the

- politics of inconclusive election in nigeria: a review of the affected states. *Khazanah Sosial*, 2(3), 105–124.
- Tarsidi, D. Z., Nugraha, I., Fadhilah, F., & Pertiwi, G. (2019). Orientasi –poligami (politik generasi milenial) dalam menghadapi pesta demokrasi 2019. *Psikologi Sosial* *Di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan*, 59–65.
- Undang -Undang. (2003). *UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden Pasal 7*.
- Wibowo, A. (2019). Pola Komunikasi Masyarakat Adat. *Khazanah Sosial*, 1(1), 15–31